

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

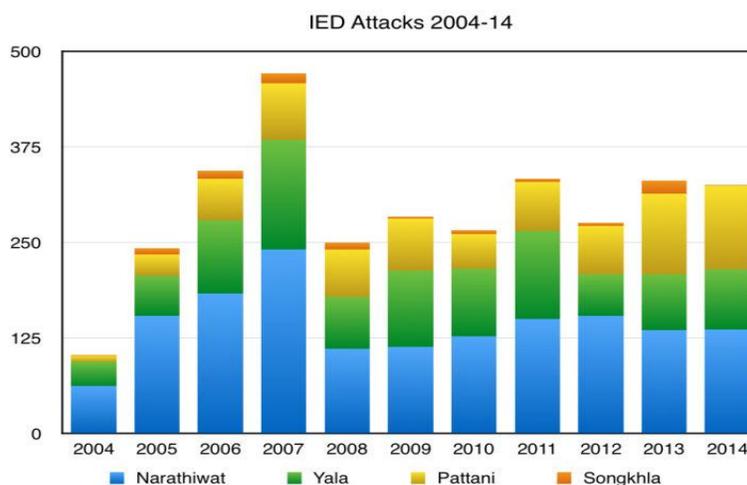
Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah (Kapur, 1998: 45), yang merupakan *buffer zone* dari perebutan wilayah Asia Tenggara antara Inggris dan Prancis (Ganesan & Amer, 2010: 201). Meskipun demikian, negara ini tidak luput dari permasalahan konflik dalam wilayahnya. Konflik yang terjadi adalah konflik antara pemerintah Thailand dengan kaum minoritas yaitu etnis Muslim Melayu. Konflik yang terjadi telah berlangsung sejak awal tahun 1970-an dan hingga kini masih belum menemukan titik temu terjadi karena etnis Muslim Melayu menuntut akan kemerdekaan dan berusaha melepaskan diri dari wilayah dan pemerintahan Thailand (Melvin, 2007:2).

Jika melihat dari perspektif historis, wilayah Patani di Thailand Selatan sebelumnya merupakan kerajaan Melayu Islam sebelum diambil alih oleh kerajaan Thai pada tahun 1902. Pada tahun 1938, Phibun Songkhram, seorang Jenderal Militer melakukan kebijakan *rathniyom* (revolusi budaya) yang bertujuan menciptakan suatu identitas budaya Thai yang maju dan kebijakan “mensiamkam” orang-orang bukan Thai (*siamization policy*) (Yazid, 2013:3). Revolusi budaya ini menjadi cikal bakal adanya ketimpangan kuat dalam hal ekonomi, sosial dan politik berakibat pada hadirnya gerakan separatis yang ingin memperoleh otonomi khusus atau ingin

memerdekakan diri. Organisasi-organisasi separatis yang berada dibawah kelompok Patani United Liberal Organization (PULO)berpengaruh besar pada gerakan pemberontakan yang terjadi di Thailand Selatan, serangan-serangan yang dilancarkan kepada Pemerintah Thailand semakin gencar dilakukan, terarah dan terkoordinasi. Selain itu, akibat lain dari gerakan separatis juga telah banyak menimbulkan kerugian seperti kerugian materi, banyak jatuh korban dari rakyat sipil, menimbulkan instabilitas politik Thailand dan juga memberikan citra negatif Thailand di mata internasional (Jitpiomsri, 2014:8-9).

Pergolakan di wilayah Patani, Narathiwat dan Yala di Thailand Selatan diwarnai dengan aktivitas kekerasan, seperti pengeboman, penembakan, pembakaran sekolah, penculikan, sabotase dan lain-lain. Pada tahun awal Januari 2004 pemberontakan tersebut memuncak dengan adanya penyerbuan terhadap markas militer Distrik Arion di Narathiwat yang menewaskan empat tentara Thailand dan hilangnya 300 senapan lengkap beserta amunisinya (Human Right Watch, 2004). Aktivitas kekerasan ini dilihat dari data organisasi pengamatan konflik Thailand Selatan Univeritas Songkhla, statistik kematian dan luka-luka dari tahun 2004 hingga 2014 merupakan puncak insiden terdapat 14.128 insiden, 6.097 tewas dan 10.908 terluka (Jitpiomsri, 2014:4).

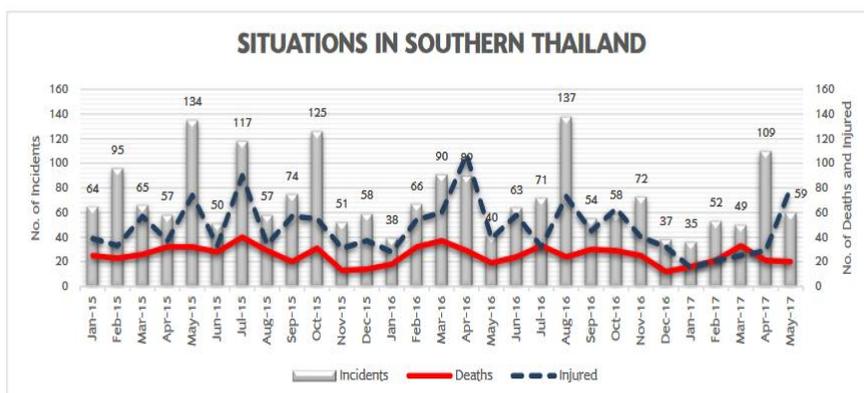
Grafik 1.1 Insiden Penyerangan oleh Kelompok Separatis di Thailand Selatan Tahun 2004-2014



Sumber : (Jitpiomsri, 2014: 7)

Grafik menunjukkan bahwa puncak aktivitas kekerasan dan *social unrest* di Thailand Selatan mulai muncul pada tahun 2004 dan mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Kenaikan sangat signifikan di tahun 2006-2007 disebabkan oleh gejolak politik dan ketidakstabilan politik pada masa kudeta militer kepada Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Akan tetapi, setelah posisi Perdana Menteri digantikan oleh Surayud Chulanont dengan adanya modifikasi kebijakan dan pendekatan baru terhadap kelompok separatis di Thailand Selatan de-eskalasi konflik sempat menurun namun kembali mengalami kenaikan dan penurunan hingga sekarang.

Grafik 1-2 Insiden Penyerangan dan Korban Kelompok Separatis di Thailand Selatan Tahun 2015-2017



Sumber : (Deep South Watch, 2017)

Grafik di atas merupakan data terbaru dari insiden penyerangan dan jumlah korban dalam konflik Thailand Selatan. Diagram menunjukkan bahwa terdapat 2.057 insiden dari Januari 2015-Mei 2017 dan mencapai puncaknya pada Agustus 2016 dikarenakan situasi politik Thailand yang terguncang karena pro dan kontra pembaruan undang-undang yang dianggap terlalu berpihak pada Raja dan Junta Militer Thailand (Kompas, 2017).

Sekuritisasi konflik separatis Thailand Selatan sebenarnya telah dilakukan pemerintah Thailand sejak tahun 1998, yaitu dengan melakukan diplomasi awal

dengan pemberontak dengan Malaysia sebagai mediator. Upaya diplomasi tersebut dilakukan karena pada tahun 1997 pada saat pertama kalinya kelompok pemberontak melakukan operasi militer secara besar-besaran yang dikenal dengan operasi daun gugur (*Falling Leaves Operation*) di wilayah Patani. Namun, pemberontakan tersebut hanya dianggap oleh pemberontakan kecil dari sekelompok gerilyawan oleh pemerintah Thailand dan tidak mengakibatkan kerugian material yang signifikan, sehingga belum dianggap sebagai isu politis oleh pemerintah Thailand. Selain itu, upaya politik diplomasi tersebut hanya dianggap sebagai angin lalu oleh kedua belah pihak karena diplomasi yang dilakukan tidak secara mengikat, dan tidak ada sanksi yang jelas apabila kedua belah pihak melanggar perjanjian tersebut.

Di saat terjadinya peningkatan konflik pada tahun 2004 dan 2005, pemerintah Thailand mulai menyadari bahwa pemberontakan di Thailand tersebut dapat meluas ke gerakan separatis dan terancamnya asas *Thailand Lak Thai* (Raja, Thai, Budha). Setelah terjadinya insiden *Arion, Krue Se dan Tak Bai*, pemerintah Thailand mulai berfokus dalam mengatasi pemberontakan tersebut dan merubah isu pemberontakan tersebut menjadi isu politik.

Hal pertama yang dilakukan pemerintah Thailand adalah melakukan upaya darurat militer terhadap konflik separatis di Thailand Selatan di Narathiwat, Yala dan Patani (Asia Peace Building Initiative, 2010). Status darurat militer ini dapat memberlakukan banyak hal, misalnya penyadapan, penggeledahan, dan penangkapan terhadap orang yang dicurigai melakukan aksi kekerasan dan mengacaukan situasi. Pada tahun 2005 pemerintah Thailand juga melakukan sekuritisasi melalui *speech act*

yang pada saat itu dilakukan oleh penasihat keamana Thailand. Dalam pernyataan tersebut pemerintah Thailand menyatakan bahwa penyerangan merupakan salah satu upaya kelompok pemberontak yang bertujuan untuk menuntut kemerdekaan dan melepaskan diri dari otonomi Thailand. Selain *speech act*, pemerintah Thailand juga melakukan upaya sekuritisasi lain yaitu membentuk badan khusus yang bertujuan untuk mengatasi konflik separatis di Thailand Selatan dan bertugas sebagai mediator dan menjembatani antara pemerintah dan masyarakat lokal Thailand Selatan yang dikenal dengan *Southern Border Province Administration Center (SBPAC)*.

Sekuritisasi konflik separatis Thailand Selatan menjadi penting untuk dibahas, selain insiden dan korban yang sudah meningkat, konflik separatis ditakutkan akan meluas ke teritorial Malaysia. Dalam hal ini adanya gangguan keamanan di perbatasan karena ratusan pencari suaka di Thailand Selatan sudah memasuki teritorial Malaysia sejak 2004, dan berdampak pada memburuknya hubungan diplomatik kedua negara (Suara Merdeka, 2005).

Konflik separatis Thailand Selatan telah menarik minat banyak orang dan cukup banyak diteliti. Namun penelitian-penelitian yang sebelumnya hanya berkisar mengenai proses asimilasi, respons pemerintah pusat dan upaya kerjasama dalam menanggulangi konflik separatis. Yuniarto(2005) dalam tulisannya membahas mengenai identitas Muslim Melayu serta faktor - faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik di Thailand Selatan. Penelitiannya memfokuskan pada kebijakan asimilasi pemerintah pusat yang menjadi cikal bakal adanya ketidakpuasan dan pemberontakan. Pratiwi (2009) membahas mengenai dinamika pilihan politik

Thailand dari raja, perdana menteri, militer dan juga alasan mengapa Indonesia berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Arisandy (2012) menulis mengenai diplomasi Thailand-Malaysia dalam mengatasi gerakan separatis di Thailand Selatan, memaparkan upaya-upaya kerjasama apa saja yang dilakukan Thailand-Malaysia dalam mengatasi gerakan separatis, dan dampaknya pada hubungan kedua negara.

Penelitian-penelitian di atas hanya menjelaskan fenomena yang terjadi secara eksplanatif. Belum ada penelitian yang menjelaskan proses sekuritisasi bagaimana isu-etno-nasionalis bisa menjadi ancaman keamanan nasional. Faktor kausal yang diteliti hanya sebatas faktor penyebab gerakan separatis dan kebijakan pemerintah Thailand. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat dari sudut pandang berbeda dengan metode eksplanatif mengenai isu etno-nasionalis dan proses munculnya ancaman keamanan di Thailand Selatan.

1.2 Rumusan masalah

Bagaimana proses sekuritisasi konflik etno-nasionalis Thailand Selatan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand?

1.3 Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses ancaman keamanan nasional bisa terkontruksi secara sosial melalui proses sekuritisasi

2) Tujuan Khusus

- a. Menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah Thailand dalam sekuritisasi
- b. Untuk memberikan penjelasan dan pemahaman bagaimana alur dan proses sekuritisasi isu etnonasionalis Thailand Selatan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand

1.4 Manfaat penelitian

1) Manfaat Akademis

- a) Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan terhadap pemahaman bentuk lain dari penelitian hubungan internasional, terutama dibidang kejahatan transnasional mengenai proses sekuritisasi pembentukan ancaman keamanan nasional.
- b) Penelitian ini dapat menawarkan pemahaman mengenai hubungan kompleksitas dan saling berkaitan erat antara teori-teori tradisional dalam hubungan internasional dan teori kritiknya.

3) Manfaat Praktis

- a) Sebagai pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami upaya sekuritisasi
- b) Sebagai bahan pertimbangan kebijakan bagi pengambil kebijakan yang berkaitan dengan penelitian ini

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis suatu permasalahan yang muncul dari sebuah fenomena sosial yang dikaji di dalam hubungan internasional, dibutuhkan suatu pisau analisis

yang bernama “teori”. Teori mengembangkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang berhubungan atau berkorelasi. Untuk itu, dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Thailand Selatan dan menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan paradigma konstruktivisme sebagai landasan utama teori, lalu diikuti dengan konstruktivisme linguistik dan sekuritasasi.

1.5.1 Paradigma Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan salah satu tradisi pemikiran yang sangat berpengaruh dalam studi Hubungan Internasional saat ini. Tradisi ini berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1989 sebagai reaksi terhadap kegagalan tradisi-tradisi dominan dalam studi Hubungan Internasional yaitu realisme dan liberalisme untuk memprediksi ataupun memahami transformasi sistemik yang mengubah tatanan dunia secara drastis (Pramono, 2010:14). Tokoh pemikikiran konstruktivis klasik berasal dari pemikir sosial seperti Hegel, Kant, dan Grotius yang kental akan paham idealisme. Sedangkan pasca Perang Dingin mulai bermunculan para konstruktivis yang cenderung berpikir tentang politik internasional seperti Nicholas Onuf (1989) dan Alexander Wendt (1989). Dalam bukunya Onuf (1989 :1) mengatakan bahwa “manusia senantiasa mengkonstruksi atau membentuk realitas sosial, atau bahkan dirinya sendiri”.

Asal mula konstruktivis lahir karena adanya kritik terbuka terhadap neo-realis dan neo-liberalis yang menganggap bahwa dunia adalah sistem yang anarki. Pandangan konstruktivis menganggap bahwa anarki bisa dimaknai sebagai hal yang

inheren dalam interaksi sosial. Artinya, konsep anarki bergantung kepada pemaknaan dari aktor-aktor internasional terhadap interaksi diantara mereka. Penganut konstruktivis juga percaya bahwa pola hubungan yang terjadi, baik konfliktual dan kerjasama, bukan merupakan hasil dari anarki dalam dunia internasional tapi ditentukan oleh subjektivitas aktor sehingga, konstruktivisme memandang anarki bukan sebagai kondisi yang bersifat *giventapi* terkonstruksi secara sosial (Rosyidin, 2015: 20).

Weber (2010: 63) dalam bukunya mengatakan bahwa konstruktivisme mempunyai sebuah asumsi ikonik yaitu "*anarchy is what states make of it*" yang dipopulerkan oleh Alexander Wendt pada tahun 1992. Maksud dari kalimat tersebut adalah bagaimana kondisi anarki yang ada di dunia ini tergantung oleh negara-negara itu sendiri. Dengan menggunakan asumsi tersebut, maka konstruktivisme mampu menyatukan pendapat dari kaum neoliberalis dan neorealis. Jika kaum neoliberalis menganggap bahwa negara-negara selalu bekerja sama, maka kondisi anarki yang muncul adalah kondisi anarki yang kooperatif. Kaum neorealis juga dapat beranggapan bahwa negara akan selalu berkonflik sehingga menciptakan anarki yang seperti mereka bayangkan. Konstruktivisme dianggap sebagai sebuah *via media* bagi kedua belah pihak yang berdebat sehingga dapat menjadi salah satu perspektif yang paling berpengaruh saat ini.

Menurut Steans, aktor dalam paradigma konstruktivisme adalah negara. Namun, tindakan negara tidak hanya didasari oleh *power* dan kepentingan seperti apa yang disampaikan oleh kaum neorealis. Konstruktivisme beranggapan bahwa

tindakan negara sebenarnya didasari karena negara telah tersosialisasikan dalam institusi politik internasional. Dengan demikian, norma-norma yang ada dalam institusi politik internasional seperti kedaulatan dan sikap non-intervensi dapat dijadikan dasar-dasar perilaku sebuah negara. Agar hal tersebut dapat tercapai, negara harus mampu menerima dan mengamalkan norma yang berlaku dalam institusi tersebut. Konstruktivisme juga beranggapan bahwa kepentingan bisa diartikan sebagai sesuatu yang ingin diraih oleh aktor dalam interaksinya dengan pihak lain, dan juga kepentingan adalah hasil pembentukan dari identitas dan norma sehingga, 'kepentingan nasional' adalah hasil dari interpretasi terhadap konteks internasional (Steans, 2010:192).

Interaksi antar individu akan menciptakan lingkungan dan atau realitas sosial antar individu yang diinginkan. Dengan kata lain, realitas sosial merupakan hasil konstruksi atau bentukan dari proses interaksi tersebut (Pramono, 2010). Hakekat manusia menurut konsepsi konstruktivisme lebih bersifat bebas dan terhormat karena dapat menolak atau menerima sistem internasional, membentuk kembali model relasi yang saling menguntungkan, atau yang diinginkan berdasarkan peraturan, strukturasi dan metode dalam *speech act*. Menurut konstruktivisme, setiap tindakan negara didasarkan pada *meanings* yang muncul dari interaksinya dengan lingkungan internasional, yang berpengaruh pada perilaku negara-negara. Dalam proses saling mempengaruhi itulah yang terbentuk *collective meanings*, inilah yang menjadi dasar terbentuknya intersubektivitas dan kemudian membentuk struktur dan pada akhirnya mengatur tindakan negara (Adler, 1997: 12-13).

Paradigma konstruktivisme memiliki perbedaan dengan pendekatan tradisional yang memandang hubungan internasional sebagai struktur material yang bisa diukur, konstruktivis memiliki kecenderungan kepada aspek gagasan yang membentuknya. Dalam menjelaskan fenomena hubungan internasional tersebut, konstruktivisme sering meminjam teori-teori dari ilmu sosial. Contohnya, konsep identitas dan norma yang dipinjam dari sosiologi, sedangkan teori 'speech act' atau teori tindak tutur dipinjam dari linguistik. Dengan adanya pencampuran antara konstruktivisme dan teori linguistik menghasilkan teori konstruktivisme linguistik (Rosyidin, 2014: 8-18).

1.5.2 Konstruktivisme Linguistik

Dalam paradigma konstruktivis terdapat beberapa kelompok moderat yang lebih menyukai cara non positivis dalam mempelajari hubungan internasional, yang dikenal dengan penganut aliran interpretivis. Pandangan mereka adalah bagaimana gagasan membentuk realitas sosial melalui medium bahasa, sehingga mereka berfokus pada realitas sosial yang terbentuk dari penggunaan bahasa (Garvey, 2010: 328).

Bahasan ini dimulai dengan dikenalkannya konsep 'permainan bahasa' (*language game*) oleh Ludwig Wittgenstein, yang banyak disalah pahami oleh banyak orang. Wittgenstein mencoba menguak makna kata-kata yang bukan hanya sebagai representasi objek tapi juga muncul makna bahasa yang bersifat 'uniform', yang berarti makna kata-kata bergantung pembentukan struktur logisnya dan makna

bahasa bergantung pada bagaimana dan dalam konteks apa ia digunakan (Wetherell & Yates, 2001:39-43).

Menurut Wittgenstein proposisi dalam bahasa berfungsi sebagai gambaran akan sebuah realitas yang ingin dibahasakan atau disampaikan. Sehingga struktur bahasa harus sesuai dengan struktur realitas. Kesesuaian antara penggunaan alat bahasa (gramatikal) dan makna yang dikandung objek (semantik) akan memudahkan dalam memahami sebuah ungkapan filsafat ataupun secara umum proposisi dalam bahasa. Untuk mempermudah kesesuaian bahasa mempunyai aturan sendiri dalam pembentukan maknanya, yang terbentuk oleh konteks ketika bahasa itu diucapkan. Jadi, ketika seseorang mengucapkan kata-kata secara tidak langsung dia seperti melakukan suatu tindakan. Poin penting dalam 'permainan bahasa' adalah bahwa ketika mengucapkan kata-kata, ada repons dari audiens untuk memaknai kata-kata tersebut (Rosyidin, 2015 : 104-105).

Konsep '*language game*' ini dikembangkan oleh John Austin (1910-1960) dalam bukunya *How to Do Thing with Words*. Sebagaimana dijelaskan oleh Austin bahwa bahasa dapat digunakan untuk melakukan tindakan melalui pembedaan antara kalimat pernyataan (*constative*) yang mendeskripsikan atau melaporkan peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan di dunia. Sedangkan kalimat melaporkan (*performative*) dideskripsikan sebagai tindakan instruksi untuk melakukan sesuatu. Bahasa dalam kalimat pernyataan (*constative*) hanya menjelaskan realitas tanpa adanya makna tertentu dan hanya berfungsi untuk melaporkan keadaan tertentu. Bahasa dalam kalimat instruksi (*performative*) terkandung makna tertentu agar

audiens merespons maksud tersebut. Inilah dasar dari teori tindak tutur (*speech act theory*)(Austin, 1962 : 6).

Teori tindak tutur ini kemudian dikembangkan lagi dan menjadi terkenal dalam studi linguistik setelah John R. Searle (1969) menerbitkan buku berjudul *Speech Act : An Essay in The Philosophy of Language*. Dalam bukunya Searle sepakat dengan pandangan Wittgenstein bahwa proposisi/bahasa harus menggambarkan keadaan faktual dari realitas. Pada 'permainan bahasa', bahasa yang sama ketika diekspresikan pada konteks dan orang yang berbeda akan memiliki makna yang berbeda dan akan saling tumpang tindih jika disampaikan dalam konteks yang berbeda (Searle, 1969 : 52).

Intinya dalam teori ini mengatakan bahwa penggunaan bahasa bukan hanya sebagai pelaporan terhadap realitas atau objek tapi berperan penting dalam membentuk realitas menentukan makna saat bahasa diucapkan, karena itulah bahasa bersifat konstitutif, atau membentuk realitas.

Dari penjelasan mengenai konsep-konsep dalam konstruktivisme linguistik diatas, dapat disimpulkan bahwa bahasa sangat berperan penting sebagai alat untuk membentuk suatu realitas. Dalam studi Hubungan Internasional, bahasa juga digunakan oleh aktor dalam hubungan internasional sebagai alat untuk menciptakan suatu realitas sosial. Teori ini cocok diaplikasikan kedalam penelitian penulis karena pemerintah Thailand menggunakan bahasa atau tindak tutur untuk mempolitisasi isu etno-nasionalis sebagai ancaman keamanan nasional dan aplikasinya akan dijelaskan dalam teori sekuritisasi.

1.5.3 Teori Sekuritisasi

Aplikasi dari konstruktivisme linguistik dalam Hubungan Internasional yang dipelopori oleh Barry Buzan, Ole Waever, serta beberapa pemikir disebut kelompok pemikir *Copenhagen School* dan berfokus pada konsep studi keamanan. Terdapat beberapa pemikiran yang dihasilkan dari kelompok ini seperti *regional security complex theory* (RSCT), *European security*, serta hubungan antara keamanan regional dan global. Selain itu, salah satu pemikiran yang paling berkontribusi dan khas dari *Copenhagen School* adalah *Securitization* (sekuritisasi).

Sekuritisasi memiliki tiga akar utama, yaitu *speech act*, pendekatan Schmittian terkait keamanan dan politik, serta asumsi yang ada di pendekatan keamanan tradisional. Apabila digabungkan, konsep 'keamanan' merupakan wacana dari keamanan nasional yang memiliki penekanan pada pihak yang memiliki otoritas yang mengkonstruksi ancaman atau musuh, yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan melakukan penerapan tindakan darurat (Buzan, 2009 : 30-31). Jadi, aktor keamanan memiliki kekuatan diskursif dan politik untuk melakukan sekuritisasi terhadap suatu isu. Keberhasilan suatu aktor dalam menunjukkan suatu isu menjadi sebuah ancaman bergantung pada keberhasilan aktor dalam mewacanakan keamanan. Terkait dengan hal ini Buzan mengatakan bahwa "*traditionally, by saying "security," a state representative declares an emergency condition, thus claiming a right to use whatever means are necessary to block a threatening development*" (Buzan &

Hansen, 2008 : 213). Dari argumen Buzan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara merupakan aktor dalam proses sekuritisasi. Dalam menunjukkan tindakan sekuritisasi, konstruktivisme lebih berfokus pada pemahaman proses konstruksi di balik produksi ancaman, bukan hanya menilai seberapa mengancam suatu realita objektif.

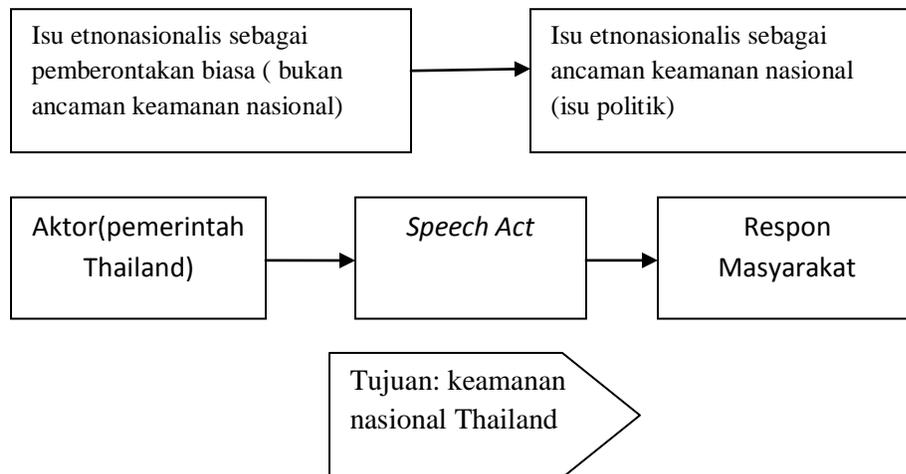
Terdapat konsep yang perlu untuk diperhatikan ketika negara melakukan proses sekuritisasi. Dalam proses sekuritisasi aktor melakukan identifikasi terhadap suatu isu (politik atau non-politik) yang tujuannya merubah isu tersebut menjadi isu keamanan. Aktor yang melakukan sekuritisasi disebut sebagai *securitizing actors*. Aktor didefinisikan sebagai, “*who securitize issues by declaring something – a referent object – existentially threatened*” (Buzan, 1998 : 67). Objek disini adalah sesuatu yang dipandang secara eksistensial terancam dan harus diamankan. Jadi, apabila isu tersebut dapat dikatakan ancaman, maka aktor sekuritisasi dapat melakukan sekuritisasi.

Suatu isu dapat dikatakan sebagai ancaman ketika negara melakukan tindakan wacana yang menyatakan isu tersebut merupakan ancaman, serta terdapat aktor lain (masyarakat) yang menyetujui hal tersebut. Agar sekuritisasi berhasil, aktor harus membuat argumen atau *speech act* yang harus diterima oleh audiens yang ditargetkan. Hal itu dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan tindakan darurat yang diperlukan untuk mencegah atau mengatasi masalah tersebut (James, 2007: 302-325).

1.6 Hipotesis

Penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa isu etno-nasionalis Thailand Selatan telah menjadi ancaman keamanan nasional Thailand karena adanya upaya sekuritisasi dari pemerintah Thailand. Dalam proses sekuritisasi ini berfokus pada proses *speech act* dimana pengambil kebijakan Thailand mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengubah cara pandang publik terhadap isu tersebut. Tujuan sekuritisasi adalah untuk mengkonstruksikan kepada masyarakat Thailand bahwa konflik etno-nasionalis Thailand Selatan merupakan ancaman keamanan nasional. Alur sekuritisasi dapat digambarkan melalui skema berikut:

Gambar 1.1 Skema Sekuritisasi Konflik Etno-nasionalis Thailand Selatan



1.6.1 Metode Penelitian

1.6.1.1 Definisi Konseptual

1.6.1.2.1 Konflik Etnonasionalisme

Etnonasionalisme didefinisikan sebagai paham kebangsaan dengan sentimen etnis (agama, suku, ras) sebagai basisnya. Etnonasionalisme ini dapat pula dipahami sebagai hilangnya loyalitas suatu kelompok etnis kepada suatu kesepakatan terhadap ikatan yang lebih besar (negara-bangsa). Konflik etnonasionalis dipicu oleh masalah identitas yang bersamaan dengan masalah distribusi sosial maupun ekonomi yang tidak merata, sehingga muncul ketidakpuasan akan redistribusi sumber-sumber daya alam, personil, dan ekonomi yang menjadi latar belakang menguatnya sentimen primordial. Politik identitas inilah yang kemudian berdampak dalam bentuk tuntutan untuk memperoleh suatu otonomi atas masa depan suatu kelompok.

1.6.1.2.2 Keamanan Nasional

Keamanan nasional adalah sebuah kebutuhan untuk menjaga ketahanan suatu bangsa melalui daya ekonomi, militer serta kekuatan politik dan kemampuan berdiplomasi. Keamanan nasional tercapai apabila suatu negara tidak lagi mendapatkan ancaman. Keamanan nasional adalah suatu kesatuan integritas teritorial dan institusinya yang sifatnya sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi dan sifatnya mutlak karena keamanan nasional merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup bangsa dan kesatuan integritas negara.

1.6.1.2.3 *Speech Act*

Tindak tutur atau *speech act* adalah pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara dapat diketahui oleh pendengar. *Speech act* dapat didefinisikan sebagai “*an utterance as a functional unit in communication*”. Pada teori

ini, *speech act* adalah unit dasar dari bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan makna, sebuah ungkapan yang mengekspresikan sebuah maksud. *Speech act*, tidak hanya digunakan untuk menunjuk sesuatu, tapi juga melakukan sesuatu. Akibatnya *speech act theory* tidak menekankan pada referensi individu dari simbol tetapi maksud dari tindakan secara keseluruhan (Austin, 1982 :154).

Tindak tutur tidak hanya merujuk pada pernyataan, namun juga tindakan. *Speech-act*, merupakan istilah yang dilakukan aktor sekuritisasi terhadap suatu isu yang dinilai sebagai ancaman. Adapun *speech-act* yang dilakukan berdasarkan pada:

“Referent objects: things that are seen to be existentially threatened and that have a legitimate claim to survival. Securitizing actors: actors who securitize issues by declaring something a referent object existentially threatened. Functional actors: actors who affect the dynamics of a sector. Without being the referent object or the actor calling for security on behalf of the referent object, this is an actor who significantly influences decisions in the field of security.”(Buzan & Waever, 1998 : 36-37).

1.6.1.2 Operasionalisasi Konsep

1.6.1.2.1 Konflik Etnonasionalis

Suatu konflik etnis bisa dikategorikan sebagai etnonasionalis apabila mencakup 5 faktor yaitu adanya kesamaan, persamaan nasib, kedekatan dalam hal fisik maupun psikologis, adanya perasaan memiliki musuh yang sama serta memiliki

motif tujuan dan keuntungan yang sama. Objek dari penelitian ini adalah etnis Melayu Muslim yang berada di wilayah Thailand Selatan, yang berbeda secara agama, suku dan ras dari penduduk mayoritas Thailand, memiliki rasa solidaritas tinggi dan adanya keinginan untuk menuntut kemerdekaannya dan membentuk otonomi sendiri.

1.6.1.2.2 Keamanan Nasional

Keamanan nasional yang dimaksud dalam penelitian ini keamanan nasional Thailand menurut perspektif *copenhagen school*, yaitu tidak hanya keamanan tradisional tapi juga mencakup isu keamanan non-tradisional. Isu keamanan non tradisional dikategorikan menjadi 5 sektor yaitu : sektor militer, sektor politik, sektor ekonomi, sektor sosial dan sektor lingkungan.

Dalam proses ini, pemerintah militer memprioritaskan keamanan nasional yang lebih berfokus pada objek yang mengancam secara militer, dan juga kebijakan Thailand dari masa pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra hingga saat ini yakni pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha sangat keamanan-sentris didukung juga dengan fakta bahwa Chan-Ocha merupakan mantan panglima tertinggi angkatan bersenjata Thailand.

1.6.1.2.3 *Speech Act*

Speech Act adalah ketika suatu negara melalui pemangku jabatan seperti Presiden, Wakil Presiden, Raja, Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, atau aktor yang memiliki kekuatan untuk mengubah kebijakan

mengatakan suatu kebijakan melalui pernyataan resmi atau pidato kenegaraan kepada publik.

Dalam penelitian ini akan berfokus pada tindak-tutur dari pemerintah Thailand yang tidak hanya merujuk pada pernyataan, namun juga tindakan yang dilakukan untuk melakukan sekuritisasi terhadap suatu isu yang dinilai sebagai ancaman keamanan nasional.

1.6.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian dan gejala terjadi. Hasil akhir penelitian berupa hubungan sebab akibat. Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana proses sekuritisasi bisa menyebabkan isu etno-nasionalis bisa menjadi ancaman keamanan nasional Thailand.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa telaah pustaka (*Library Research*) yaitu dengan cara pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berupa buku, artikel, dokumen, internet, majalah maupun surat kabar.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sarosa (2012:7) metode kualitatif merupakan penelitian yang mencoba

memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya, di mana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati. Melalui pendekatan kualitatif diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu objek dan menghasilkan suatu makna yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba memahami mengenai proses terjadinya sekritisasi isu etno-nasionalisme yang bisa menjadi ancaman keamanan nasional bagi Thailand dikaji menggunakan perspektif konstruktivisme.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penelitian terbagi atas 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut Bab I adalah bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori dan metode penelitian yang terdiri dari definisi konseptual, operasionalisasi konsep, desain/tipe penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan. Bab II mengenai deskripsi gerakan separatis di Thailand Selatan, dalam bab ini akan memaparkan mengenai dinamika konflik di Thailand Selatan, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya gerakan separatis dan menjelaskan siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam gerakan separatis tersebut serta bagaimana respons dunia internasional terhadap isu etnonasionalis Thailand Selatan. Bab III menjelaskan mengenai respon dan usaha Pemerintah Thailand dalam mengatasi konflik Etno-nasionalis dan juga menjelaskan bagaimana

proses sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Thailand. Bab IV merupakan bab terakhir penelitian ini memuat kesimpulan dan saran.